

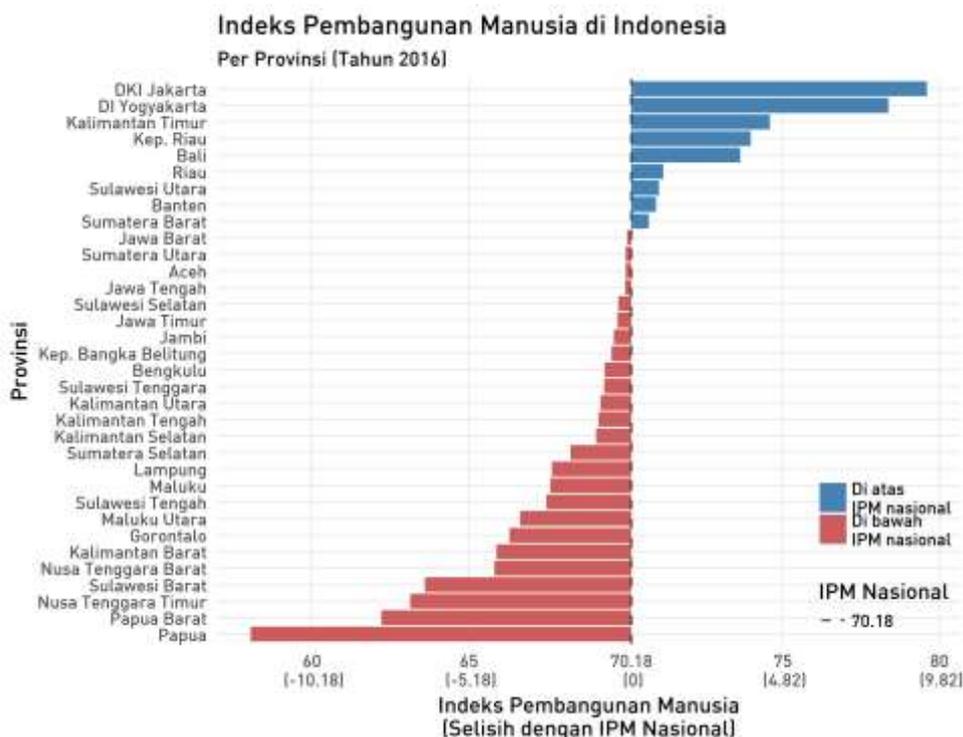
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, selalu menjadi perbincangan hangat terutama kesenjangan wilayah. Sampai saat ini kesejangan terpusat pada kesenjangan desa dan kota, kawasan timur dan kawasan barat Indonesia. Kesenjangan yang tercipta lahir karena banyak faktor seperti, pembangunan sarana publik, transportasi, pembangunan kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Kesenjangan publik dapat berupa pelayanan administrasi, dan pelayanan sosial, kesenjangan transportasi dapat berupa fasilitas kendaraan umum yang memadai atau perbedaan kelayakan sarana transportasi yang ada. Kesenjangan Nasional dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti pemenuhan infrastruktur, fasilitas kesehatan, aksesibilitas, pendidikan, industri.

Melihat suatu wilayah tersebut tergolong dalam wilayah yang maju atau tidak bisa dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mempresentasikan dari tiga faktor yaitu nilai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai angka 70,18 pada tahun 2016. Terdapat sebanyak 9 provinsi yang memiliki IPM diatas angka nasional dan 25 provinsi yang memiliki IPM dibawah angka nasional. DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dengan angka 79,60 sedangkan Papua memiliki IPM terendah dengan angka 58,05. Dengan perbedaan sebesar 21,55 antara IPM tertinggi dan terendah, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar provinsi di Indonesia masih cukup tinggi (Ridha, 2017). Lebih jelasnya Persebaran IPM dan besarnya nilai tiap wilayah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: BPS, 2017

Usaha meningkatkan kualitas negara, menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang pemerintahan daerah desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintahan daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Solusi untuk mempercepat pembangunan adalah dengan menetapkan pusat pertumbuhan pada wilayah tersebut. Hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan dengan berfokus pada satu wilayah, yaitu daerah yang berperan sebagai pusat pertumbuhan, dalam meningkatkan pembangunannya (Priyadi, 2017).

Penelitian ini mengambil wilayah Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang dipilih karena wilayahnya yang strategis, baik dari sistem transportasi, perdagangan, pendapatan perkapita dan lain-lain. Wilayah ini tergabung dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) GERMAKERTOSUSILA Plus dengan pusat Kota Surabaya. Ditinjau dari jarak kota provinsi wilayah ini berjarak 78 km dari Surabaya. Dari PDRB atas dasar harga berlaku ditahun 2017 di wilayah Jawa Timur sekitar 20,191 Triliun, Kabupaten Jombang menyumbang pendapatan

sebanyak 2,384 Triliun. Sumbangi pendapatan ini tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih dekat dengan Surabaya seperti Gersik 2,726 Triliun, Mojokerto 1,909 Triliun, dan Bangkalan 1.523 Triliun. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 Kabupaten Jombang menempati peringkat 17, berada dibawah Mojokerto, Sidoarjo, Kota Batu, Madiun, Probolinggo dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun pendapatan kabupaten ini tergolong tinggi, namun nilai IPM masih berada di bawah kabupaten atau kota yang memiliki pendapatan wilayah lebih rendah. Oleh karena itu wilayah ini perlu dianalisis dari fasilitas publik, nilai interaksi antar wilayah, serta penentuan sektor-sektor prioritas dan sektor yang belum terdorong untuk mencapai pembangunan wilayah yang optimal.

Dalam RTRW Kabupaten Jombang tahun 2009 tentang rencana Sistem Wilayah Pengembangan (SWP) terbagi menjadi lima meliputi, 1). WP Jombang dengan wilayah administrasi Kecamatan Jombang, Peterongan, tembelang, Jogoroto dan diwek, 2). WP Mojoagung dengan wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung, Sumobito dan Kesamben, 3). WP Ploso dengan wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan, 4). WP Bandar Kedungmulyo dengan wilayah administrasinya Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Megaluh, Perak, dan Gudo, 5). WP Mojowarno dengan wilayah administrasinya Kecamatan Mojowarno, Wonosalam, Bareng dan Ngoro. Fungsi WP Kabupaten Jombang sebagai wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai ibu kota kabupaten serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala kabupaten. Dengan ditentukannya WP maka saat ini pembangunan seperti pusat ekonomi, pusat pelayanan publik, hotel, mall, pengelolaan pariwisata, jaringan jalan yang baik masih terpusat pada wilayah pembangunan di Jombang ini, alhasil menyebabkan disparatisme pembangunan antar wilaayah yang ada.

Permen PU no.16 Tahun 2009 mendeskripsikan bahwa kawasan tertinggal adalah suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup yang disebabkan oleh kemiskinan secara struktural dan natural. Kawasan tertinggal di Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan Ngoro,

Mojowarno, Bareng, Sumobito, Megaluh, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan. Jadi hampir setengah di kecamatan kabupaten ini tergolong sebagai kawasan tertinggal.

Penduduk di suatu wilayah terhadap wilayah lain akan melakukan suatu perpindahan. Perpindahan terjadi karena banyak faktor, seperti ekonomi, mendekati tempat pekerjaan, faktor pendidikan, dan sebagainya. Sepuluh kecamatan yang tergolong sebagai kawasan tertinggal secara mayoritas angka migrasi masuk antar kecamatan tergolong kecil. Berbeda dengan kecamatan yang tak tergolong sebagai kawasan tertinggal seperti Diwek, Peterongan, Jombang, Jogoroto, Mojoagung, masing-masing memiliki angka migrasi 646, 489, 854, 428, dan 376. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kawasan maju dengan fasilitas yang lebih lengkap memiliki daya tarik yang lebih tinggi dari kawasan tertinggal.

Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang pada hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 1.205.114, dan di tahun 2017 menjadi 1.253.078 mengalami peningkatan hampir 50 ribu penduduk. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar dari tahun 2010-2017 adalah Kecamatan Jogoroto dengan 8,21% , disusul Kecamatan Jombang 6,21%, Sumobito 5,62%. Oleh karena itu akibat peningkatan jumlah penduduk diperlukan pula peningkatan fasilitas yang tersedia di daerah sebagai faktor pendorong pelayanan dan kegiatan aktivitas ekonomi.

Data BPS Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka tahun 2018 menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebesar 12.23% sekitar 149.600 jiwa. Angka ini terus turun hingga tahun 2017 sebesar 10.48% dari total jumlah penduduk yang ada, atau sekitar 131.160 jiwa.. Pendapatan penduduk miskin di wilayah ini sebesar 353.456/bln. Sekitar 60 persen penduduk di Kabupaten Jombang masih tergolong masyarakat menengah kebawah, maka perlunya solusi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fokus penelitian ini akan menekankan kepada bagaimana menciptakan suatu pembangunan wilayah yang merata. Penelitian ini akan memberikan suatu saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang tentang wilayah mana yang

perlu didukung dalam pembangunan sarana dan prasarana publik, mengetahui wilayah mana yang kurang memiliki daya tarik dalam kegiatan masyarakatnya, serta kegiatan ekonomi apa yang menjadi komoditas dan non komoditas di tiap wilayahnya. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadikan sebuah refresi dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan juga sebagai rujukan meningkatkan pendapatan daerah untuk mendorong ekonomi masyarakat yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hierarki antar wilayah di kecamatan Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana Interaksi antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Jombang ?
3. Apa Sektor Basis tiap kecamatan di Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Hierarki antar wilayah di kecamatan Kabupaten Jombang ;
2. Menganalisis Interaksi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang ;
3. Mengidentifikasi Sektor Basis tiap kecamatan di Kabupaten Jombang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Jombang dalam perencanaan wilayah ;
2. Sebagai bahan referensi pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Jombang ;
3. Sebagai Referensi penelitian selanjutnya tentang hierarki, interaksi dan pengembangan sektor prioritas ;
4. Sebagai refrensi pembelajaran teknik analisis perencanaan wilayah;
5. Sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Jombang.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Penelitian selalu berhubungan dengan penelitian sebelumnya, dan setiap hasil penelitian pasti menciptakan sebuah hasil atau kesimpulan terhadap obyek maupun subyek yang diteliti. Hasil – hasil dari tiap penelitian yang sama akan menciptakan sebuah terori baru, ataupun pemutahiran teori sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibutuhkan kajian telaah pustakan untuk

menjabarkan bahwasannya penelitian tentang hierarki, interaksi dan sektor basis pada suatu wilayah itu penting, dan juga dibutuhkan hasil – hasil penelitian sebelumnya untuk membantuk proses dalam pengerjaan penelitian ini serta sebagai pembanding hasil terhadap wilayah yang lainnya dengan metode yang sama.

1.5.1 Telaah Pustaka

Pendekatan geografi dalam pengembangan wilayah dilakukan dengan cara memperhatikan aspek-aspek geografi yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini dilakukan melalui tahapan penetapan masalah, pengumpulan data, dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan perwilayahan korelasi dan analogi. Oleh karenanya adanya keragaman berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah dan skala waktu pelaksanaan, disusun skala prioritas pengembangan wilayah. Berikut beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini :

a) *Economic Base*

Teori Basis Ekonomi di kemukakan oleh Harry W. Richardson di tahun 1973 menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

b) *Multiplier Effect*

Teori ini menyatakan bahwa suatu kegiatan akan dapat memacu timbulnya kegiatan yang lain. Teori ini hampir sama dengan teori *Tricking Down* tetapi lebih mengacu pada bentuk kegiatan, sedangkan teori *Tricking Down Effect* lebih mengacu pada ruang. Teori *Multiplier Effect* berkaitan dengan pengembangan perekonomian suatu daerah. Makin banyak kegiatan yang timbul makin tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pengembangan wilayah.

c) *Teori Lokasi*

Choirul & Musiyam (2017) menyatakan bahwa teori tempat sentral adalah teori geografis yang berusaha menjelaskan jumlah, ukuran, dan lokasi permukiman penduduk dalam sistem perkotaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *central place theory* sendiri tidak langsung membuktikan bahwa wilayah sejatinya memiliki kedudukan hierarki.

d) Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Tahun 1990 dikemukakan oleh Francois Perreoux menggunakan teori *pole de croissance* menekankan bahwa pertumbuhan tidak muncul di setiap tempat secara simultan dan serentak. Pertumbuhan itu harus diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan.

Menurut Richardson, yang menyebabkan terjadinya pusat pertumbuhan dikarenakan adanya keuntungan agglomerasi yang didapat dari keputusan untuk berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi. Keuntungan agglomerasi ini didapat karena adanya keuntungan skala yang berasal dari antara lain; fasilitas-fasilitas perbankan, sosial, pemerintahan, pasar tenaga kerja, perusahaan jasa-jasa khusus tertentu. Para pemilik modal akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah agglomerasi, sehingga menyebabkan industri – industri menjadi terpusat di daerah ini terutama industri inti (dalam skala besar). Industri inti mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah (Adisasmita 2005).

e) Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh seorang ahli geografi Jerman yaitu Walter Christaller. Christaller menjelaskan tentang kota sentral yang merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lainnya. Menurut Christaller setiap orde memiliki wilayah heksagonal sendiri-sendiri. Bentuk pola pelayanan heksagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti :

1. Pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota.
2. Saranan dan prasarana transportasi.

3. Tempat rekreasi dan olahraga.
4. Sarana pendidikan, kesehatan, obyek
5. wisata.

Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan didalam kota.

f) Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Konsep teori Hirschman yang dipaparkan oleh Sjafrizal (2014), menyatakan bahwa lebih mengutamakan perhatiannya pada pertumbuhan wilayah tidak seimbang. Dimana secara geografis pertumbuhan ekonomi wilayah akan dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan di suatu wilayah pada satu titik tempat yang menimbulkan dorongan ke arah perkembangan titik-titik atau tempat-tempat berikutnya. Teori Hirschman melihat tingkat pembangunan di suatu wilayah cenderung tercapai pada beberapa titik pertumbuhan. Dimana kegiatan atau aktivitas ekonomi lebih lebih berpusat pada daerah tersebut karena ketersediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan dibandingkan tempat lainnya. Dampaknya akan terjadi peningkatan migrasi dari daerah luar ke daerah growing center.

A. Otonomi Daerah

Pada tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam, dewasa ini mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang ini hanya merupakan pendukung kebijaksanaan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Keadaan demikian menyebabkan, pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi juga mengalami perubahan cukup penting dibandingkan dengan apa yang telah kita alami dalam era sentralisasi pada pemerintahan Orde Baru yang lalu (Sjafrizal, 2014).

Makna dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan - kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Keberhasilan suatu otonomi daerah akan ditentukan oleh banyak hal. Riswandha Imawan menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah ditentukan oleh :

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah ;
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*) (Sakinah, 2013).

B. Perencanaan Wilayah

Sjafrizal tahun 2014 mengutarakan Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Arthur W Lewis mendefinisikan perencanaan adalah “ suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”. Kemudian M.L Jhingan seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkret tentang perencanaan pembangunan tersebut. Menurut pendapatnya “ perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu”. Hal ini sejalan dengan Michael Todaro yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut : “ suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupaun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional”. Sesuai UUD Nomer 25 Tahun 2004 terdapat lima tujuan dan fungsi pokok dalam rangka mendorong pembangunan nasional ;

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan ;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

C. Pendekatan Pembangunan Wilayah

Tarigan dalam buku terbitan tahun 2016 mengutarakan Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan region. Pendekatan sektoral biasanya *less-spatial* (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan kondisi ruang/penggunaan lahan saat ini (saat penyusunannya) dan kondisi ruang yang dituju, misalnya 25 tahun yang akan datang.

1. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi didalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor - sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Caranya adalah masing-masing sektor dipreteli (*break-down*) sehingga terdapat kelompok-kelompok yang bersifat homogen. Terhadap kelompok yang homogen ini dapat digunakan peralatan analisis yang biasa digunakan untuk kelompok tersebut. Misalnya untuk menganalisis sektor pertanian, sektor tersebut dapat dibagi atas subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan rakyat, subsektor perkebunan besar dan seterusnya.

Pendekatan sektoral, untuk tiap sektor/komoditi, semestinya dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban tentang ;

1. Sektor/komoditi apa yang memiliki *competitive advantage* diwilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing dipasar global ;
2. Sektor/komoditi apa yang basis dan non basis ;
3. Sektor/komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi ;

4. Sektor/komoditi apa yang memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang tinggi ;
5. Sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal di wilayah tersebut ;
6. Sektor/komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja persatu satuan modal dan persatuan hektar lahan.

Atas dasar berbagai kriteria diatas, dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor/komoditas apa yang perlu dikembangkan diwilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Penetapan skala prioritas sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena keterbatasan dana terutama yang berasal dari anggaran pemerintah.

2. Pendekatan Regional

Pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral walaupun tujuan akhirnya adalah sama. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang pada mulanya mengabaikan faktor ruang (spasial). Memang pendekatan sektoral dapat diperinci atas daerah yang lebih kecil, misalnya analisis sektoral perkabupaten, kecamatan, atau perdesa, sehingga seakan faktor ruang telah terpenuhi.

Pendekatan regional dalam pengertian sempit adalah dengan memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa yang sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut. Dengan demikian penggunaan ruang serasi dan efisien agar memberi kemakmuran yang optimal bagi masyarakat. Analisis regional adalah analisis penggunaan ruang saat ini, analisis atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang dimasa yang akan datang. Analisis regional didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang dan barang dari satu daerah ke

daerah lainnya adalah bebas dan bahwa orang akan berpindah berdasarkan daya tarik suatu daerah yang lebih kuat dari daerah lain.

Pendekatan ruang adalah pendekatan dengan memperhatikan ;

1. Struktur ruang saat ini ;
2. Penggunaan lahan saat ini ;
3. Kaitan suatu wilayah dengan wilayah tetangga.

Unsur-Unsur struktur ruang yang utama adalah ;

1. Orde-orde perkotaan, termasuk didalamnya konsentrasi permukiman ;
2. Sistem jaringan lalu lintas, termasuk penetapan jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, dan jaringan jalan lokal ;
3. Kegiatan ekonomi bersekala besar dan terkonsentrasi, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, dan kawasan perkebunan.

D. Urgensi Pembangunan Antar Wilayah Secara Berimbang

Disparatis Regional merupakan fenomena *universal*. Disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparatis pembangunan merupakan masalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Pada banyak negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah sosial politik. Hampir disemua negara baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi terancam secara terpusat, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparatis antar wilayah (Erna Rustiadi, 2011).

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai bangsa. Disisi lain, potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah - wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak - haknya. Selanjutnya kemiskinan di wilayah belakang/pedesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat - pusat pertumbuhan pada akhirnya menjadi melemah dan tidak efisien karena timbulnya berbagai penyakit “urbanisasi” yang luar biasa. Ketidak efisien dan

permasalahan seperti munculnya kawasan kumuh, tingginya tingkat polusi, terjadinya kemacetan, kriminalitas dan sebagainya. Perkembangan kota akhirnya menjadi sarat dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi (Erna Rustiadi, 2011).

Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah melalui pembangunan berbagai infrastruktur fisik (jaringan transportasi jalan, pelabuhan jaringan komunikasi, dan lain-lain) yang dapat menciptakan keterkaitan fisik antar kawasan. Keterkaitan fisik harus disertai kebijakan - kebijakan yang menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Oleh karena itu, keterkaitan *inter-regional* yang diharapkan adalah bentuk - bentuk keterkaitan yang sinergis atau saling memperkuat bukan saling memperlemah atau *eksploitatif* (Erna Rustiadi, 2011).

Menurut Murry pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal ini tidak selalu berarti bahwa semua wilayah harus mempunyai perkembangan, tingkat industrialisasi, pola ekonomi, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil sumbangan interaksi yang saling memperkuat antar semua wilayah yang terlibat (Erna Rustiadi, 2011).

E. Interaksi Wilayah

Keterkaitan antar wilayah menggambarkan hubungan antar wilayah, dan diartikan sebagai "Interaksi". Secara harfiah interaksi dapat diartikan sebagai hal yang saling mempengaruhi sedangkan *inderdependency* dapat diartikan saling bergantung. Dalam kaitan interaksi antar wilayah permukiman, Rondinelli tahun 1985 menyatakan bahwa proses - proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan - keterkaitan (*linkages*) seperti pernyataan sebagai berikut : "... proses-proses interaksi dibentuk oleh keterkaitan-keterkaitan (*linkages*) diantara permukiman,

itu berarti pada mana penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan dan kampung - kampung kecil memperoleh akses ke pendidikan, fasilitas, insfrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berlokasi di kota-kota kecil dan kota-kota besar. Melalui keterkaitan-keterkaitan ini penduduk desa menerima banyak input yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan pasar barang yang mereka produksi". Bintaro menyatakan bahwa interaksi dapat dilihat sebagai satu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, ataupun proses politik dan sejenisnya, yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. (Kasikoen, 2011).

F. Metode Gravitasi

Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan dalam ilmu fisika oleh Sir Issac Newton. Utoyo memaparkan inti dari teori gravitasi bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. W. J. Reilly berpendapat bahwa bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Keterkaitan antar wilayah yang biasanya diukur dengan mobilitas orang dan barang antar daerah merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam analisis perencanaan pembangunan daerah. Aspek ini perlu diperhitungkan karena pembangunan suatu daerah juga ditentukan oleh keterkaitan dan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga yang berdekatan (Sjafrizal, 2014).

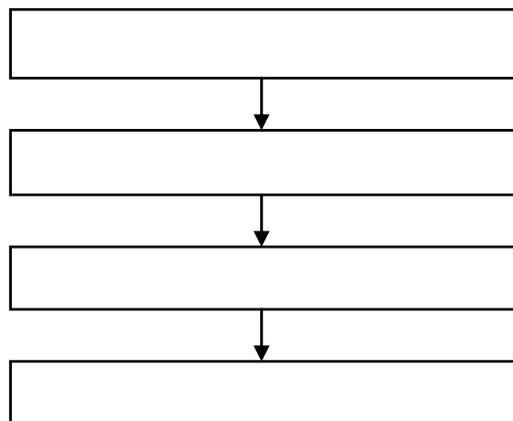
Teori gravitasi dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan interaksi antar wilayah yang bersebelahan secara kuantitatif, dengan asumsi suatu wilayah sebagai benda dan jumlah masyarakat sebagaimana.

G. Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP dikembangkan oleh Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, dimana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalkan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan

masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok - kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan prioritas, konsistensi logika. Manfaat AHP: (1) memadukan intuisi pemikiran, perasaan, dan pengindraan dalam menganalisis pengambilan keputusan, (2) memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor yang ada, (3) memudahkan pengukuran dalam elemen, dan (4) memungkinkan perencanaan ke depan (Fachruddin, 2013).

AHP adalah salah satu analisis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan. AHP merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan kriteria sangat kompleks yang diprioritaskan pada kriteria paling dominan. AHP juga banyak digunakan pada pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1993).



Gambar1.2 Hierarki Fasilitas Publik
Sumber:Saaty, 1993

Hierarki dari rencana struktur ruang wilayah kabupaten berkaitan dengan rancangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Hierarki yang teratas dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digolongkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kecamatan. Maka wilayah administrasi yang memiliki fasilitas yang terlengkap akan tergolong sebagai PKL. Penggolongan selanjutnya adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, fasilitas yang dimiliki akan tergolong lebih rendah dari PKL. Yang terakhir adalah Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan dalam skala desa, maka fasilitas yang dimiliki juga tergolong lebih rendah dari PPK. Dasar AHP ada beberapa sebagai berikut ;

a) Dekomposisi

Tahapan ini Struktur masalah yang terbilang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian dalam sebuah hierarki. Tujuannya adalah mendefinisikan dari yang umum sampai yang khusus. Masing-masing himpunan alternatif memungkinkan untuk dibagi lebih jauh untuk menjadi tingkat yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lainnya. Level paling atas merupakan tujuan dari penyelesaian masalah dan hanya ada satu elemen. Level berikutnya mungkin memiliki beberapa elemen sebagai kriteria, dimana masing-masing elemen tersebut bisa dibandingkan antara satu dan lainnya, memiliki kepentingan yang tergolong hampir sama atau tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok pada masing - masing elemen. Jika perbedaannya terlalu besar harus dibuatkan level yang baru.

b) Perbandingan Penilaian

Tahapan ini akan dibuat sebuah perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dalam hierarki dengan tujuan menghasilkan sebuah skala kepentingan relatif dari masing-masing elemen. Penilaian akan

menghasilkan sebuah skala penilaian yang berupa angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan sebuah prioritas.

c) Sintesa Prioritas

Sintesa Prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hierarki sesuai dengan kriterianya.

H. Analisis Skalogram

Analisis Skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas - fasilitas yang ada di daerah itu seperti fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan pemerintahan. Dengan menggunakan analisis skalogram dapat ditentukan kecamatan yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Kecamatan yang memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi dapat ditentukan sebagai pusat pertumbuhan (Ermawati, 2010).

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang digunakan apabila suatu wilayah memiliki ranking tertinggi maka lokasi atau wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi suatu pusat pertumbuhan (Hesty, 2010).

Analisis skalogram untuk penelitian ini sebagai cara mengetahui pusat dan hierarki di Kabupaten Jombang, dengan cara mengidentifikasi fasilitas pelayanan yang ada. Hasil dari metode ini memberikan hierarki tiap kecamatan dari peringkat yang rendah hingga tinggi menurut beragam fasilitas publik yang ada.

Metode Skalogram adalah metode paling sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan analisis fungsi wilayah, karena hanya menunjukkan daftar dari komponen - komponen pendukungnya. Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui hierarki kota berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Hierarki kota akan berfungsi sebagai pusat - pusat pelayanan baik skala regional maupun lokal (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

I. *Location Qoutions (LQ)*

Location Qoutions (LQ) merupakan pemikiran basis ekonomi yang akan membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan. Pertama, kegiatan industri yang melayani pasar didaerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini sering disebut sebagai *Industry Basic*. Kedua, kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar hanya didaerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini dinamakan *Industry Non Basic* atau industri lokal. Dasar pemikiran LQ berasal dari Teori *Economic Base*, yang menyangkut tentang produksi barang dan jasa untuk pasar didaerah yang bersangkutan maupun diluar daerah, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi didaerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hannya menaikkan permintaan terhadap industri *basic*, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri *non basic*. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan industri *basic* (Munandar 2010).

J. Teknik Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dapat dilaksanakan dalam praktik. Karena itu teknik evaluasi ini lazim pula dinamakan sebagai Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKDP). Bilamana ternyata pelaksanaan tersebut sesuai atau lebih tinggi

dari sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan semula, maka pelaksanaan rencana tersebut dikatakan berjalan dengan baik. Akan tetapi, bilamana ternyata pelaksanaan rencana tersebut tidak sesuai atau berada dibawah sasaran dan target yang ditetapkan maka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dikatakan kurang berhasil. Secara spesifik ada dua tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pertama untuk dapat mengetahui faktor-faktor utama penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Kedua, sebagai masukan dan usulan perbaikan dan penyempurnaan untuk perumusan penyesuaian kebijakan pembangunan guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimasa yang akan datang (Safrizal, 2014).

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, evaluasi tahunan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kedua, Evaluasi Pertengahan Jalan (*Mid-tern Review*) dari suatu RPJMD. Ketiga, Evaluasi Tahunan (*Annual Review*). Keempat, Evaluasi lima tahun ketika melakukan penyusunan RPJMD. Kesemua evaluasi ini dilakukan secara berkala sesuai dengan periode waktu masing-masing perencanaan. Sasaran utama evaluasi pelaksanaan rencana secara umum adalah untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam rencana semula (Safrizal, 2014).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait analisis hirarki dan interaksi wilayah ;

Penelitian yang dilakukan oleh Unggul Priyadi dan Eko Atmadji (2017) dengan judul penelitian Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah *Hinterland* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kesesuaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing kabupaten/kota dalam menetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisis tingkat persebaran geografis ketersediaan fasilitas publik pada masing-masing

kabupaten/kota di daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan sumber data sekunder dari Badan Pusat Statistika (BPS). Menggunakan metode analisis Konsentrasi Geografi, Analisis Skalogram, dan Analisis Gravitasi. Penelitian ini menghasilkan mengukur tingkat persebaran fasilitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengetahui hierarki di wilayah ini beserta wilayah *hinterlad* serta mengetahui wilayah kabupaten mana yang menjadi pusat pertumbuhan.

Penelitian Selanjutnya adalah dilakukan oleh Yarman Gulo (2012) dengan judul Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan wilayah pendukungnya dalam pengembangan wilayah Kabupaten Nias. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Nias, dan menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (*Growth centre*) dan daerah sekitarnya (hinterland) kecamatan pendukung. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa instansi terkait, pegawai kecamatan, pegawai Bappeda, dan pihak-pihak terkait seperti fasilitas ekonomi, sosial pemerintahan, jumlah penduduk, jarak antar kecamatan, Metode analisis menggunakan Skalogram dan Analisis Gravitasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Nias berdasarkan fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan digunakan alat Analisis Skalogram. Melihat keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten Nias. Hasil Analisis Skalogram dan Analisis Gravitasi dikaitkan dengan kebijakan RTRW kabupaten Nias.

Penelitian Selanjutnya adalah MG. Endang Sri Utari yang berjudul Analisis Sitem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik Kota Yogyakarta dan mengetahui Kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan melalui kelengkapan fasilitas yang tersedia yang disesuaikan dengan pusat pertumbuhan kota yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) kota Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistika. Data yang dikumpulkan

adalah fasilitas yang tersedia di masing-masing kecamatan. Metode analisis menggunakan Skalogram. Hasil dari penelitian ini berupa kecamatan Umbulharjo dan kecamatan Gondokusuan memiliki tingkat orde yang paling tinggi.

Penelitian selanjutnya adalah Aris Munandar yang berjudul Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi letak strategis Kecamatan Gemolong yang berada di perempatan antara Kabupaten Grobogan dan Kotamadya Surakarta, serta antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali/Salatiga. Tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi kawasan industri kecil pertokoan, rumah makan, rumah sakit, yang berada disekitar Kecamatan Gemolong. Tujuan yang terakhir adalah mengidentifikasi perubahan sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor unggulan yang menjadi potensi penggerak pembangunan di Kecamatan Gemolong. Metode penelitian secara deskriptif kuantitatif, dengan metode analisis jarak dan kesempatan terdekat, pola permukiman, skalogram, *Location Quotients (LQ)*, dan *Shift Share*. Hasil dari penelitian ini berupa Kecamatan gemolong memiliki potensi besar berdasarkan aksesibilitasnya, Kecamatan Gemolong Berpotensi menjadi Pusat pelayanan wilayah serta Sektor basis berupa listrik, air minum, bangunan dan konstruksi, keuangan, persewaan dan jasa.

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian ini
1	Priyadi dan Eko Atmadji (2017)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah <i>Hinterland</i> di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis kesesuaian penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) di daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing kabupaten/kota dalam menetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta ; Menganalisis tingkat persebaran geografis ketersediaan fasilitas publik pada masing-masing kabupatten/kota di daerah Istimewa Yogyakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Deskriptif ; Menggunakan data Sekunder ; Analisis dengan Konsentrasi Geografi , Skalogram, dan Gravitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur tingkat persebaran Fasilitas pertumbuhan Ekonomi ; mengetahui hierarki di wilayah ini beserta wilayah <i>hinterlad</i> ; mengetahui wilayah kabupaten mana yang menjadi pusat pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Priyadi berlokasi di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian saya di Kabupaten Jombang ; Penelitian saya hanya menggunakan Metode Skalogram dan Grafitasi; Sama-sama menggunakan data Sekunder dari BPS ; Penelitian saya mengetahui kebutuhan fasilitas tiap kecamatan ;
2	Yarman Gulo (2012)	Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpeluang atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten Nias ; Menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data sekunder ; Analisis menggunakan Skalogram dan Grafitasi 	<ul style="list-style-type: none"> mengetahui pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten nias berdasarkan fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di gunakan alat analisis skalogram ; Melihat keterkaitan antar 	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan Lokasi Yarman di Kabupaten Nias dan Saya di Kabupaten Jombang ; Saling mengidentifikasi interaksi antar kecamatan, dan untuk mengetahui dimana pusat pertumbuhan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian ini
		Kebupaten Nias.	antara pusat pertumbuhan (<i>Growth centre</i>) dan daerah sekitarnya (hinterland) kecamatan pendukung.		pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten Nias ; <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi untuk Kebijakan RTRW kabupaten Nias; 	terjadi ; <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode yang sama ; Output penelitian saya adalah untuk RPJMD tidak RTRW.
3	MG. Endang Sri Utari	Analisis Sitem Pusat Pelayanan Permukiman di kota Yogyakarta Tahun 2014	mengetahui Karakteristik Kota Yogyakarta dan mengetahui Kecamatan - kecamatan sebagai pusat pertumbuhan melalui kelengkapan fasilitas yang tersedia yang di sesuaikan dengan pusat pertumbuhan kota yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Data Sekunder dari BPS ; Analisis menggunakan Skalogram 	Hasil dari penelitian ini berupa kecamatan Umbulharjo dan kecamatan Gondokusuan memiliki tingkat orde yang paling tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan lokasi penelitian saya di Kabupaten Jombang, dan penelitian Endang di Yogyakarta ; Penelitian saya menggunakan dua metode yaitu Skalogram dan Grafitasi, sedangkan penelitian Endang hanya Skalogram ; Menggunakan metode LQ untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan
4	Aris Munandar 2010	Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi peranan penting dalam peningkatan perekonomian di kecamatan Gemolong ; Mengidentivikasi kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Jarak terdekat ; Pola permukiman ; Skalogram ; Location Quotions ; 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan gemolong memiliki potensi besar berdasarkan aksesibilitasnya ; Kecamatan ini Berpotensi menjadi Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Persamaan dengan penelitian saya menggunakan metode skalogram dan LQ ; Perbedaannya penelitian saya menggunakan metode

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian ini
			industri kecil, pertokoan, Rumah makan, Rumah sakit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ; • Mengidentifikasi sektor basis untuk penggerak pembangunan	• Shift Share	pelayanan wilayah ; • Sektor basis berupa listrik, air minum, bangunan dan konstruksi, keuangan, persewaan dan jasa.	gravitasi.

Sumber:

Pengolahan

Data,

2019

1.6 Kerangka Penelitian

Kesenjangan akan mengakibatkan permasalahan dalam skala makro dan akan sangat merugikan pembangunan capaian suatu negara. Terjadinya disparitas yang makin melebar antar wilayah dapat menyebabkan potensi konflik pada wilayah tertinggal akan menuntut hak-hak pemerataan pembangunan nantinya. Setiap negara didunia memiliki permasalahan yang hampir sama seperti, kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan tingginya angka kriminalitas. Di Indonesia menurut UU no 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kebijakan ini dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan dengan berfokus pada satu wilayah. Merujuk dari aturan ini sesuai dengan peraturan RTRW Kabupaten Jombang No. 21 tahun 2009 menetapkan rencana sistem pusat kegiatan sebagai kawasan perkotaan dimasa depan berada di wilayah Kecamatan Mojoagung, Ploso, Bandar Kedungmulyo, Perak dan Mojowarno.

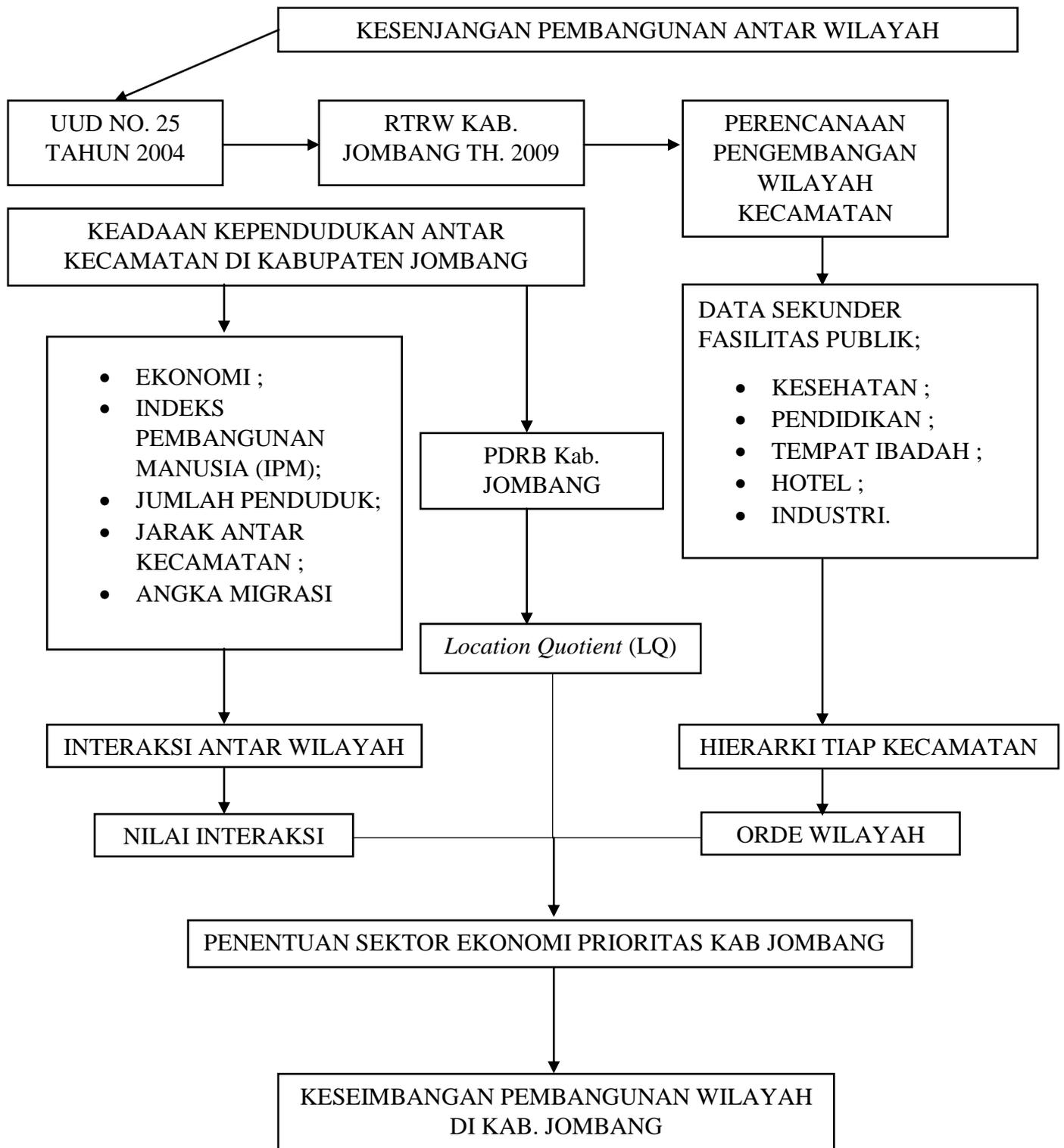
Perencanaan pengembangan wilayah tiap kecamatan harus selaras dengan pertumbuhan penduduk. Jika suatu perencanaan pembangunan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, dan terjadi sentralisasi pembangunan hal ini akan mendorong terjadinya migrasi menuju wilayah yang memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap. Perencanaan untuk mencegah migrasi dapat berupa pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, industri, dan hotel. Jumlah data Fasilitas publik tiap kecamatan akan menentukan hierarkinya. Tiap-tiap kecamatan akan digolongkan dalam tiap-tiap orde yang berbeda. Semakin lengkap fasilitas yang ada maka penggolongan orde semakin baik, begitupula sebaliknya.

Disentralisasi akan berdampak terhadap keadaan kependudukan antar kecamatan di Kabupaten Jombang. Karena terjadinya perbedaan ini menyebabkan seperti perbedaan pola ekonomi di masyarakatnya, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kepadatan penduduk, aksesibilitas, jumlah angka migrasi baik masuk/keluar. faktor perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan nilai interaksi antar kecamatan. Faktor pembedanya jika kecamatan tergolong maju, maka memiliki nilai interaksi yang tinggi terhadap kecamatan yang berada di

sekitarnya. Hal ini karena penduduk yang berada di wilayah sekitarnya membutuhkan fasilitas yang lebih baik, akhirnya melakukan mobilitas menuju daerah dengan pemenuhan fasilitas publik yang lebih baik.

Nilai interaksi antar wilayah akan menentukan daerah mana yang memiliki daya tarik yang besar. Tiap kecamatan akan dihitung terhadap kecamatan yang lainnya. jika nilai sudah diketahui maka dapat diinterpretasikan kecamatan mana yang menjadi daya tarik dan wilayah mana yang juga berpotensi juga memiliki daya tarik terhadap wilayah lain.

Data PDRB tiap kecamatan akan digunakan untuk menentukan Location Quotient (LQ). Data yang digunakan berupa pendapatan dari sektor-sektor ekonomi yang di hasilkan tiap-tiap kecamatan. Data akan diolah menggunakan metode LQ. Metode ini akan menghasilkan basis-basis ekonomi apa saja yang terdapat di tiap kecamatan. Jika basis sudah diketahui maka dapat menjadi referensi dalam pengelolaan wilayah di tiap-tiap kecamatan berdasarkan sektor-sektor unggulan, dan dapat merencanakan sektor-sektor apa saja yang perlu didorong untuk lebih baik. Lebih jelasnya tentang kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :



Gambar 1.3 Diagram Penelitian
Sumber: Pengolahan Data, 2019